



## EKSPOR IKAN MALUKU KE HONG KONG

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Hatta Arisandi (kiri) berbincang bersama Direktur PT Rajawali Laut Timur, Hasan (kanan) saat pelepasan ekspor ikan kerapu hidup PT Rajawali ke Hong Kong, di Teluk Ambon, Provinsi Maluku, Sabtu (16/4). Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menerbitkan sertifikat Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB) untuk PT Rajawali sebagai perusahaan penerima pertama untuk industri keramba jaring apung di Indonesia, sehingga memangkas waktu layanan ekspor dari tujuh hari menjadi satu hari bahkan bisa hanya satu jam.

# Pemerintah Terbitkan PP Perpajakan dan PNBP Pertambangan Batu Bara

“Adanya kepastian hukum mengenai PPh yang lebih baik melalui PP ini diharapkan semakin memudahkan pelaku usaha di sektor ini dalam menunaikan kewajiban pajak,” kata Febrio Kacaribu.

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara yang ditetapkan pada 11 April 2022. “PP ini menjadi tonggak penting sebagai landasan hu-

kum konvergensi kontrak yang nantinya berakhir menjadi rezim perizinan dalam upaya peningkatan penerimaan negara,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/4). Dilansir dari Antara, PP ini diterbitkan untuk melengkapi

UU nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur bahwa kontrak pertambangan yang berakhir dapat diperpanjang dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Bagian pertama PP ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan untuk pelaku usaha pertambangan batu bara, yakni pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang IUPK, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan pemegang PKP2B. “Adanya kepastian hukum

mengenai PPh yang lebih baik melalui PP ini diharapkan semakin memudahkan pelaku usaha di sektor ini dalam menunaikan kewajiban pajak,” lanjut Febrio. Pada bagian kedua, pemerintah mengatur besaran tarif PNBPN produksi batu bara secara progresif mengikuti kisaran Harga Batubara Acuan (HBA) bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Dengan demikian, pada saat HBA rendah, tarif PNBPN produksi batu bara juga rendah dan tidak membebani pemegang IUPK, sebaliknya saat harga komoditas naik, negara juga mendapatkan PNBPN yang tinggi dari produksi batubara.

Untuk mendorong pemanfaatan produksi batu bara bagi industri di dalam negeri, pemerintah juga menetapkan tarif tunggal yang lebih rendah sebesar 14 persen bagi produksi batu bara untuk penjualan dalam negeri. “Implementasi peraturan ini diharapkan tetap mampu menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan negara dengan upaya tetap menjaga keberlanjutan pelaku usaha, sehingga akan menjadi fondasi terwujudnya keberlanjutan pendapatan untuk mendukung konsolidasi fiskal ke depan,” ucap Febrio. • **hen**



**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

## Kemenkeu Alokasikan THR ASN Rp34,3 Triliun

**JAKARTA (IM)** - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran mencapai Rp34,3 triliun dalam rangka pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara baik pusat dan daerah, TNI, serta Polri pada tahun ini. “Kebijakan pemberian THR sudah diatur dalam APBN tahun anggaran 2022,” katanya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Sabtu (16/4). Sri Mulyani menjelaskan, alokasi anggaran untuk THR tersebut telah ditampung dalam APBN tahun ini yang penyalurannya akan dilakukan melalui Kementerian/Lembaga (K/L), Dana Alokasi Umum (DAU) dan bendahara umum negara. Untuk anggaran THR dengan penyaluran dilakukan oleh K/L memiliki alokasi sebesar Rp10,3 triliun yang ditujukan kepada ASN pusat, TNI dan Polri. Untuk THR melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp15 triliun yakni bagi ASN

daerah yaitu PNSD dan PPPK yang dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah. Sementara THR bagi pensiunan dilakukan melalui anggaran yang telah dialokasikan pada bendahara umum negara dengan total Rp9 triliun. Secara rinci, penerima THR tahun ini meliputi sebanyak 1,8 juta pegawai aparatur negara pusat, 3,7 juta pegawai aparatur negara daerah dan 3,3 juta orang pensiunan. Menurut Sri Mulyani, pemberian THR ini dilakukan sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara serta pensiunan dalam menangani pandemi melalui pelayanan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi. “Kebijakan ini diharapkan akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan bertumbuhnya daya beli masyarakat,” ujarnya. • **dro**

## Indonesia Lakukan Penetrasi Produk Perikanan ke Jepang

**JAKARTA (IM)** - Indonesia kembali berpartisipasi pada The 19th Seafood Show Osaka 2022 yang berlangsung pada 13—14 April 2022 di ATC Hall Osaka, Jepang. Keikutsertaan pada pameran ini menjadi bagian gebrakan Indonesia dalam melakukan penetrasi produk perikanan hasil laut ke Jepang. The 19th Seafood Show Osaka 2022 merupakan pameran produk perikanan terbesar di wilayah Jepang bagian barat (Kansai). Pameran ini diikuti sekitar 400 importir maupun retailer yang berdomisili di Jepang. Pada pameran ini Indonesia menjadi satu-satunya peserta dari luar Jepang yang mengikuti pameran. Pameran ini juga menjadi tindak lanjut pelaksanaan Foodex Tokyo 2022 dan menjadi rangkaian promosi yang dilakukan perwakilan perdagangan di Jepang, khususnya untuk produk makanan minuman perikanan Indonesia. “Jepang merupakan salah satu negara dengan konsumsi produk perikanan terbesar di dunia dengan total nilai impor dari seluruh dunia mencapai lebih dari USD 9,9 miliar. Partisipasi Indonesia dalam pameran ini menjadi langkah tepat untuk menggebrak

dan meningkatkan volume ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi, dilansir dari laman Kemendag, Minggu (17/4). Didi menyampaikan, Indonesia merupakan negara pemasok hasil laut dan perikanan ke-11 bagi Jepang dengan pangsa pasar sebesar 4 persen. Pada 2021, total nilai transaksi ekspor sektor ini ke Jepang tercatat sebesar USD433,8 juta atau naik 3,19 persen dibanding tahun sebelumnya. Lebih lanjut, ia menyebut peningkatan pangsa pasar tuna sirip kuning segar dan dingin asal Indonesia ke Jepang terus ditingkatkan melalui inovasi produk. “Salah satunya dengan memperkenalkan tuna sirip kuning kintoshi/cut off yang dihadirkan dalam Paviliun Indonesia,” ujarnya. Partisipasi Indonesia pada ajang ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya Konsulat Jenderal RI (KJRI) Osaka dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Tokyo. Partisipasi dikoordinasikan Tim Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Osaka dan Tim Ekonomi KJRI Osaka. Paviliun

Indonesia dibuksecara resmi oleh Konjen RI Osaka Diana Emilla Sari Sutikno pada Rabu (13/4). Pada pembukaan ini Konjen Diana didampingi Atase Perdagangan Anief Wibisono, Kepala ITPC Osaka Dicky Farabi, Plt. General Manager BNI Tokyo Dyah Paramita, dan Presiden Japan Fisheries Association Toshiro Shirasu. Pada pameran ini, Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 24 m2 atau 6 kali lebih luas dari keikutsertaan di tahun sebelumnya. Paviliun Indonesia menghadirkan sembilan perusahaan dari berbagai daerah di Indonesia. Perusahaan tersebut yakni PT Sriwijaya Karya Sejahtera, PT Edmar Mandiri Jaya, PT Bartuh Langgeng Abadi, PT Bali Maya Permai, PT Adipatria Samudra Lestari, PT Jawa Suisan Indah, CV Anugerah Artha Abadi, CV Giovanni Sukses Makmur, serta Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera. “Diharapkan para peserta bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam keikutsertaannya di ajang ini, Panitia juga telah mempromosikan Paviliun Indonesia dalam situs resmi agar semakin banyak buyer yang tertarik berbisnis dengan pelaku usaha Indonesia,” tutupnya. • **dot**

## Penyaluran KPR BNI Tumbuh 8% pada Februari 2022

**JAKARTA (IM)** - PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk membukukan pertumbuhan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau KRI Kriya sebesar delapan persen pada Februari 2022 untuk mendukung pemulihan sektor properti. “Tren pertumbuhan kredit properti pada kuartal I 2022 cenderung meningkat, khususnya KPR BNI Griya, di mana per Februari 2022 mencapai Rp49,8 triliun, tumbuh di atas 8 persen (yoy),” ungkap Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (17/4). Corina menjelaskan pertumbuhan KPR pada dua bulan pertama tahun ini telah meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi ini juga melampaui pertumbuhan KPR sepanjang 2021 yang tumbuh 7,7 persen (yoy) mencapai Rp49,6 triliun. Dengan perbaikan sektor properti dan perekonomian tahun ini, perseoran siap untuk mencapai target kredit secara total 7-10 persen (yoy), salah satunya melalui berbagai penawaran menarik kepada para calon debitur BNI Griya. “Program BNI Griya yang ditawarkan antara lain suku bunga mulai

3,4 persen fixed 2 tahun pertama, cicilan ringan dengan opsi bayar bunga saja hingga 2 tahun pertama, serta kemudahan pengajuan KPR secara online dengan eForm BNI Griya yang dapat diakses melalui website BNI, BNI mobile banking atau ketik <http://bit.ly/eFormBNIgriya>,” kata Corina. Sebelumnya BNI juga menyelenggarakan BNI Griya Expo Online pada 2020 yang merupakan pameran properti virtual pertama di Indonesia. Sementara itu BNI juga menyelenggarakan fasilitas pembiayaan proyek pembangunan pabrik Katalis Merah Putih dengan maksimum Rp257,9 miliar. Fasilitas ini terdiri atas kredit investasi, modal kerja, serta pemberian plafon LC/SKBDN, GB, dan SBLC. Pembiayaan itu merupakan bentuk kontribusi BNI dalam menyediakan one stop banking solution terhadap greenfield project yang dapat memberikan dampak baik secara bisnis maupun lingkungan. PT Katalis Sinergi Indonesia merupakan perusahaan patungan antara PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha Subholding Commercial and Trading Pertamina, PT Pertamina Lubricants, PT Pupuk Indonesia (Per-

sero) melalui anak usaha PT Pupuk Kujang, serta Institut Teknologi Bandung (ITB) dan inovasi startup. BNI berperan memberikan pembiayaan dan solusi perbankan untuk keperluan pembangunan pabrik Katalis Merah Putih, yang merupakan produsen katalis pertama dari Indonesia. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020. Proyek ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, akan memproduksi katalis-katalis yang sepenuhnya dikembangkan dan dipatenkan secara mandiri di dalam negeri. “Dengan pembangunan pabrik ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor katalis secara signifikan, mempercepat lahirnya inovasi produk dan teknologi baru, membangun daya saing industri dalam negeri sekaligus meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi bangsa Indonesia,” ujar dia. • **dro**

# FIT HUB

## PRESALE

### SPECIAL PRICE

Rp **199 RIBU** PER BULAN NO ADMIN FEE




**FREE PROGRAMS**

WEIGHT TRAINING - ZUMBA - FIT BOX - YOGA - DANCE

Contact Us

**THATA**  
0812 1288 0882